

ANALISIS WACANA POLITIK BERBAHASA INDONESIA BIDANG PEMBANGUNAN ERA REFORMASI DI KABUPATEN SITUBONDO

Political Discourse Analysis Of Indonesian Language In Development Sector In Reform Era In Situbondo Regency

Amir Chalis Andriyansyah, Dr. Sukatman, M.Pd., Rusdhianti Wuryaningrum, S. S., M. Pd.

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto, Jember 68121

e-mail: halisandriyansyah@yahoo.co.id

Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Banyak klasifikasi wacana diantaranya wacana politik. Wacana politik merupakan wacana yang berkaitan dengan dunia politik dan mengandung hipokrisi serta menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Wacana Politik tumbuh subur di setiap daerah, seperti halnya di kabupaten Situbondo yaitu *Situbondo Kota Santri*. Kajian pada penelitian ini terdiri atas empat rumusan masalah, yaitu 1) bagaimanakah bentuk wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo; 2) bagaimanakah konteks wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo; 3) bagaimanakah ideologi yang terkandung pada wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo; dan 4) bagaimanakah fungsi dari wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian Analisis Wacana. Data penelitian ini berupa ragam bahasa lisan dan tulis berbentuk wacana politik bidang pembangunan era reformasi yang mengindikasikan karakter atau maskot daerahnya. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 86 wacana politik. Data diambil menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan catat. Proses analisis data dalam penelitian terdiri atas pengamatan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terdapat bentuk, konteks, ideologi dan fungsi pada wacana politik bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo. Pertama, konteks wacana politik yang berupa teks dan non teks. Kedua, ideologi wacana politik yang meliputi sosial budaya, sosial politik dan sosial ekonomi. Ketiga, ideologi yang terkandung dalam wacana politik meliputi ideologi Islam, ideologi demokrasi dan ideologi humanisme. Dan keempat, fungsi wacana politik diantaranya direktif, informatif dan pencitraan budaya dan pariwisata.

Kata Kunci: *wacana politik, bentuk wacana politik, konteks wacana politik, ideologi wacana politik, dan fungsi wacana.*

Abstract

Discourse is a unit of language over the sentence level used to communicate in a social context. There are many classifications of discourse, including political discourse. Political discourse is a discourse related to politics and contains hypocrisy as well as hides the reality. Political discourse grows well in every region, such as that in Situbondo Regency which is referred to as Situbondo Kota Santri (Situbondo City of Santri—Islamic Boarding School students). The research discussed four problem formulations: 1) how is the form of political discourse in Indonesian language in development sector in reform era in Situbondo Regency; 2) how is the context of political discourse in Indonesian language in development sector in reform era in Situbondo Regency; 3) how is the ideology that existed in political discourse in Indonesian language in development sector in reform era in Situbondo Regency; and 4) how are the functions of political discourse in Indonesian language in development sector in reform era in Situbondo Regency. The research used qualitative descriptive design, and the research type was discourse analysis. The research data were in the form of variety of oral and written language of political discourse in the field of development in reform era that indicated the region characters or mascot. The data used in this research covered 86 political discourses. Data were collected by documentation, interviews and records. The process of data analysis in this research consisted of data observation, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results showed form, context, ideology and functions of political discourse in the field of development in the reform era in Situbondo Regency: first, the context of political discourse in the form of texts and non-texts; second, the ideology of political discourse that covered socio-cultural, socio-political and socio-economic aspects; third, the ideology contained in the political discourse included Islamic ideology, democracy ideology and humanism ideology; and, fourth, the functions of political discourse such as directive, informative and imaging of culture and tourism.

Keywords: *political discourse, forms of political discourse, context of political discourse, ideology of political discourse and discourse functions.*

Pendahuluan

Wacana merupakan tataran yang paling besar dalam hierarki kebahasaan. Banyak klasifikasi wacana diantaranya wacana politik. Wacana Politik merupakan wacana yang berkaitan dengan dunia politik. Menurut Trubs (dalam Mulyana, 2005: 69) analisis wacana adalah merujuk pada upaya mengkaji pengaturan bahasa atau klausa dan kalimat dan karenanya satuan kebahasaan yang lebih luas, seperti pertukaran percakapan atau bahasa tulis sesuai fungsi bahasa.

Berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, Sudaryanto (1993:15) menyatakan fungsi bahasa yang paling menonjol adalah sebagai alat komunikasi. Sebagai sarana komunikasi antaranggota masyarakat, keberadaan bahasa tidak akan terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan fenomena kebahasaan di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangannya tidak terlepas dari dinamika sejarah Indonesia. Proses transisi masyarakat Indonesia dari wilayah negara kolonial ke wilayah yang merdeka sebagai negara kebangsaan, pada saat yang sama mendudukkan bahasa Indonesia pada posisi yang strategis dan vital (Halim, 1980:19-20). Dalam proses yang berkelanjutan fungsi dan kedudukan itu disadari atau tidak, bahasa Indonesia telah dikukuhkan sebagai wahana tunggal dalam kegiatan pembangunan. Seluruh aktivitas pembangunan akan disampaikan melalui bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan akan selalu terkait dengan proses-proses pembangunan yang berlangsung.

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses sosial politik karena pembangunan akan berhubungan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang telah digariskan sampai dapat terlaksana, minimal mendekati yang diharapkan. Pembangunan pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan daerah pada umumnya. Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan hingga masa reformasi saat ini untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini pembangunan juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pembangunan daerah saat ini dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut melalui wacana politik dan slogan pembangunan yang mengindikasikan karakter atau maskot daerahnya untuk memicu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Sebenarnya wacana politik seperti gambar di atas mengandung hipokrisi dan menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya dan ketika dikaji lebih dalam mengandung bentuk, konteks, ideologi dan fungsi di

dalamnya. Wacana semacam itu tumbuh subur di tiap-tiap daerah, seperti halnya di kabupaten Situbondo tersebut yakni *Situbondo Kota Santri*. Oleh karena itu bagi peneliti, hal tersebut merupakan wacana politik yang sangat strategis sebab wacana tersebut mengandung maksud kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi alasan pengangkatan skripsi yang berjudul “**Analisis Wacana Politik Berbahasa Indonesia Bidang Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo**”.

Metodologi Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah analisis wacana.

Data penelitian ini berupa ragam bahasa lisan dan tulis berbentuk wacana politik bidang pembangunan yang mengindikasikan karakter atau maskot daerahnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana politik bidang pembangunan di era reformasi yang terdapat pada situs resmi, taman kota, logo kabupaten atau instansi pemerintah di kabupaten Situbondo. Data diambil menggunakan metode rekam. Proses analisis data dalam penelitian terdiri atas pengamatan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Ada dua instrumen pembantu yang digunakan dalam penelitian ini yakni tabel instrumen pengumpul data dan tabel instrumen pemandu analisis data. Tabel pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data sebelum dianalisis. Tabel pemandu analisis digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan. Prosedur penelitian terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian laporan penelitian.

Hasil Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, pembahasan ini mencakup empat hal, yaitu (1) bentuk wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo, (2) konteks wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo, (3) ideologi yang terkandung pada wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo, dan (4) fungsi wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan era reformasi di kabupaten Situbondo.

1. Bentuk Wacana Politik Berbahasa Indonesia Bidang Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo

Pembahasan mengenai bentuk wacana dalam penelitian ini berdasarkan sumber wacana politik yang menjelaskan bidang pembangunan di Kabupaten Situbondo. Sumber tersebut meliputi sumber informasi yang berupa wacana teks dan non teks.

a. Bentuk Wacana Teks

Pada penelitian ini, wacana teks diperoleh dari dari website resmi kabupaten Situbondo dan hasil wawancara. Berikut pembahasan mengenai bentuk wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan daerah di kabupaten Situbondo.

1. Wacana Deskriptif

Melalui Situs Resmi pemerintah kabupaten Situbondo (<http://www.situbondokab.go.id/>) yang berbentuk wacana deskriptif bersifat menggambarkan sesuatu tentang kabupaten Situbondo.

2. Wacana Ekspositori

Berdasarkan hasil wawancara terkait penelitian ini, salah satu bentuk wacana politik bidang pembangunan di kabupaten Situbondo dapat diklasifikasikan menjadi wacana ekspositoris karena bersifat menjelaskan sesuatu tentang kabupaten Situbondo secara informatif.

3. Wacana Hortatori

Salah satu bentuk wacana politik bidang pembangunan di kabupaten Situbondo dapat diklasifikasikan menjadi wacana Hortatori karena bersifat persuasif dengan maksud mempengaruhi pendengar atau pembaca agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Dalam penelitian ini wacana yang bersifat persuasif tersebut di dapat dari kantor PCNU kabupaten Situbondo.

b. Wacana Nonteks

Dalam penelitian ini wacana non teks diperoleh melalui gambar atau slogan pembangunan yang terdapat di taman-taman kota, tempat wisata atau pun di instansi pemerintah.

2. Konteks Wacana Politik Berbahasa Indonesia Bidang

Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo

Seperti yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka, konteks pada wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan kabupaten Situbondo meliputi konteks sosial budaya, sosial politik dan sosial ekonomi.

a. Konteks Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Situbondo mayoritas bersuku Madura. Pandangan hidup mayoritas masyarakat kabupaten Situbondo tercermin dalam ungkapan *bhuppa' bhabbu' ghuru rato*. Dalam kehidupan [sosial budaya](#) orang Madura terdapat standart referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama secara khirarkikal. Sebagai aturan normatif yang mengikat kepada semua orang Madura, maka palanggaran atau paling tidak melalaikan aturan itu akan mendapat sanksi sosial secara kultural.

Dari situlah filosofi tersebut sangat kuat dan menjadi penanda identitas kultural orang Madura. Oleh karena itu, kepatuhan orang Madura (mayoritas masyarakat kabupaten Situbondo) baik kepada norma, kultur ataupun hukum terhadap figur-figur utama tersebut terimplementasi pada

kata "Tertib" yang terdapat dalam akronim wacana politik SANTRI sebagai harapan dari terwujudnya program pembangunan daerah.

Kondisi sosial-budaya yang paling kuat adalah ketika masyarakat suku Madura khususnya yang berada di daerah pesisir kabupaten Situbondo seperti di kecamatan Panarukan merasa dilecehkan harga dirinya sehingga membuatnya *tada'ajinah* (pengingkaran terhadap eksistensi diri sehingga tidak berguna dan bermanfaat baik secara sosial maupun budaya). Misalnya, kasus-kasus [carok](#) yang terjadi akibat pelecehan harga diri tidak dapat dilepaskan dengan kondisi seperti ini. Hal tersebut yang dinilai sebagai karakter masyarakat bersuku Madura khususnya di daerah pesisir, sehingga pemerintah kabupaten Situbondo di dalam program pembangunan daerahnya mengharapkan agar masyarakat selalu tertib sesuai aturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika tercipta kondisi yang baik dan tertib maka kabupaten Situbondo terkesan memiliki suasana yang rapi. Butir inilah yang sangat diharapkan pemerintah di dalam program pembangunan daerahnya yang terimplementasi pada kata "Rapi" dalam akronim wacana politik SANTRI.

Dengan cara pandang tersebut, sifat keberanian dan menjaga rasa malu di mayoritas masyarakat kabupaten Situbondo khususnya daerah pesisir dapat terwujud sesuai harapan program pembangunan daerah yang terimplementasi pada kata "Aman dan Nyaman" dalam akronim wacana politik SANTRI.

b. Konteks Sosial Politik

Kabupaten Situbondo sebagai daerah yang menjadi barometer politik ormas NU di Jawa Timur memiliki figur sentral yang kharismatik yaitu seorang kiai. Peranan kiai di kabupaten Situbondo sangat penting, dan orientasi masyarakatnya adalah kiai, tidak pada kepemimpinan birokrasi. Sebagai pemimpin informal, kiai adalah orang yang diyakini masyarakat mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik.

Keterlibatan kiai dalam politik praktis merupakan hal yang lazim ditemukan dalam kehidupan politik kontemporer di Indonesia. Meskipun gerakan politik kiai di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, akan tetapi pada zaman pemerintahan orde baru, gerakan politik yang dilakukan oleh kiai seolah hilang dari konstelasi politik Indonesia. Baru pada masa reformasi politik yang terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan tumbangnya rezim pemerintahan orde baru, peran kiai dalam politik praktis di Indonesia kembali menjadi fenomena yang hangat diperbincangkan. Seperti halnya dalam kasus pemilu ataupun pilkada kebanyakan dari masyarakat desa memilih parpol atau calon kepala daerah bukan atas dasar hati nuraninya sendiri, melainkan atas perintah atau anjuran sang kiai. Fenomena ini banyak ditemukan di daerah-daerah tapal kuda di Jawa Timur seperti Di Kabupaten Situbondo. Banyak dari kalangan masyarakatnya yang memilih atau memberikan suaranya terhadap parpol-parpol ataupun calon kepala daerah atas dasar restu kiai.

c. Konteks Sosial Ekonomi

Penduduk mayoritas di Situbondo adalah Madura di samping penduduk Jawa dan Using. Etnik lain yang dianggap sebagai minoritas adalah orang-orang Cina, Arab, dan etnik lain.

Rupanya masih ditemukan kesenjangan ekonomi dalam berbagai bentuk pada masyarakat kabupaten Situbondo. Dari sisi etnis, orang Tionghoa lebih kaya dibandingkan orang Jawa atau orang Madura. Di samping itu juga ada perbedaan ekonomi antara orang Jawa dan orang Madura. Secara ekonomi, rata-rata ekonomi orang Jawa jauh lebih baik dibandingkan orang Madura karena fakta di lapangan orang Jawa cenderung bekerja dalam birokrasi, bukan sebagai buruh atau petani.

Dari uraian di atas dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Situbondo yang mayoritas masyarakatnya bersuku Madura selalu merepresentasikan kondisi buruh atau petani yang kurang berpendidikan. Oleh karena itu, dengan gambaran dan problem kondisi serta adanya kebijakan di atas, pemerintah melalui program pembangunan daerah mengharapkan semua masyarakat kabupaten Situbondo lebih berpendidikan dan terjamin kesehatannya karena sehat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan. Hal tersebut terimplementasi pada kata "Sehat" dalam akronim wacana politik SANTRI. Ketika tingkat kesehatan tinggi dengan akses dan fasilitas yang memadai pada masyarakat kabupaten Situbondo maka menunjukkan tingkat pendidikan dan ekonomi yang semakin berkembang. Namun hal tersebut, kemungkinan kecil terwujud jika pemerintah tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui program pembangunan daerahnya sangat mengharapkan kota Situbondo yang bebas banjir dengan lingkungan yang bersih dan indah. Hal ini terimplementasi dalam kata "Indah" pada wacana politik SANTRI sebagai wujud keseriusan pemerintah di dalam menangani kasus ini.

3. Ideologi Wacana Politik Berbahasa Indonesia Bidang Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo

Dalam penelitian ini terdapat beberapa ideologi yaitu ideologi Islam, demokrasi, dan humanisme.

a. Ideologi Islam

Agama merupakan simbol ketuhanan bagi setiap penganutnya, tak terkecuali masyarakat kabupaten Situbondo yang mayoritas beragama Islam. Identitas ke-Situbondo-an yang notabene penduduknya beragama Islam tradisional diwujudkan dalam bentuk semboyan "SANTRI". Pengaruh tersebut tidak akan terlepas dari peran tokoh dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi sentral kekuatan massa kala itu di kabupaten Situbondo.

Pada awal tahun 1980-an, NU mengalami banyak tantangan dan kepentingan yang cukup menyulitkan bagi NU untuk bergerak. Satu sisi pemerintah memberlakukan de-NU-isasi atau pembersihan orang-orang NU dari PPP

(Partai Persatuan Pemangunan), sementara di dalam tubuh NU sendiri terjadi konflik kepentingan antara kelompok politisi dan kelompok kiai. Akhirnya organisasi ini pecah menjadi dua kelompok yang masing-masing merasa berkepentingan untuk menyelamatkan NU.

Dari situ dapat dikatakan bahwa orang Islam boleh berideologi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan agama. Penerimaan Pancasila apa adanya semestinya tidak menjadi persoalan bagi NU, karena NU sejak awal telah ikut menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) pada tahun 1945 dan dengan demikian berarti NU telah menerima Pancasila, bukan sebagai taktik politik, melainkan karena NU benar-benar percaya terhadap universalitas prinsip-prinsip ideologi ini.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tanpa harus mencampur adukkan ideologi tentang ke-Situbondo-annya. Pancasila yang bersifat duniawi tidak bisa di-agama-kan dan agama yang berdasarkan pada wahyu tidak boleh di-Pancasila-kan.

b. Ideologi Demokrasi

Kabupaten Situbondo sebagai daerah yang menjadi barometer politik ormas NU di Jawa Timur memiliki figur sentral yang kharismatik yaitu seorang kiai. Peranan kiai di kabupaten Situbondo sangat penting, dan orientasi masyarakatnya adalah kiai, tidak pada kepemimpinan birokrasi.

Dinamika politik Indonesia menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan kiai dalam kancah politik praktis merupakan kenyataan politik yang terjadi dari tingkat nasional hingga daerah. Di daerah, keterlibatan kiai dalam politik dapat diidentifikasi dari banyaknya kiai yang menjadi pengurus partai, terutama partai yang berasaskan agama, atau partai yang mengusung spirit keagamaan Islam.

Seperti halnya dalam kasus pemilu ataupun pilkada kebanyakan dari masyarakat desa memilih parpol atau calon kepala daerah bukan atas dasar hati nuraninya sendiri, melainkan atas perintah atau anjuran sang kiai. Fenomena ini banyak ditemukan di daerah-daerah tapal kuda di Jawa Timur khususnya Di Kabupaten Situbondo. Banyak dari kalangan masyarakatnya yang memilih atau memberikan suaranya terhadap parpol-parpol ataupun calon kepala daerah atas dasar restu kiai.

Oleh karena itu, masyarakat kabupaten Situbondo dalam proses memilih atau dukungan suara terhadap parpol atau calon kepala daerah yang di dalamnya terdapat atau bertengger nama kiai yang mereka segani bukan atas dasar ketundukan rasional, melainkan ketundukan irrasional. Tidak heran jika sebagian dari parpol-parpol dalam pemilu menggunakan jasa kiai dalam berkampanye.

c. Ideologi Humanisme

Munculnya sosok atau figur kiai di tengah-tengah kancah politik saat ini, cukup menimbulkan ironi tersendiri bagi kalangan umat Islam. Peta kekuatan politik di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa masyarakat dengan basis pesantren maupun umum tradisional

memiliki kedekatan komunikasi politik dengan figur seorang kiai. Cara pandang yang berbeda sering menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan antara satu kelompok kiai dengan kelompok kiai yang lainnya sehingga sangat berpengaruh terhadap masyarakat simpatisan dan para pendukung fanatiknya.

Pandangan itulah yang kemudian dimaknai “kegagalan” integrasi politik dan ekonomi kabupaten Situbondo dalam sistem nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh tipisnya pengaruh partai pemerintah dalam beberapa kali Pemilu. Namun, kuatnya pengaruh kiai di tengah masyarakat kabupaten Situbondo karena faktor ekologi dan sistem sosial. Ekologi tegalan hingga sekarang masih dominan. Apa yang dikenal dengan “Revolusi Hijau” dan “Revolusi Biru” di bidang pertanian tidak mampu mengubah sistem sosial, politik dan kultural di kabupaten Situbondo. Ekosistem tegal sudah menjadi satu dengan masyarakat kabupaten Situbondo, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruhnya pada organisasi sosial dan sistem simbol masyarakatnya.

4. Fungsi Wacana Politik Berbahasa Indonesia Bidang Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo

Fungsi wacana tersebut terdapat dua fungsi diantaranya fungsi direktif, informasional dan pencitraan budaya pariwisata.

a. Fungsi Direktif

Alasan yang mendasari wacana politik berbahasa Indonesia Bidang Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo merupakan fungsi direktif karena pemerintah menyampaikan pesan guna memengaruhi masyarakat. Dalam wacana tersebut, pemerintah memengaruhi penerima pesan (masyarakat) untuk mendorong semangat juang yang tinggi bagi masyarakat Situbondo dalam melaksanakan pembangunan daerah.

b. Fungsi Informasional

Fungsi wacana politik *Situbondo Santri* berikutnya adalah fungsi informasional karena Fungsi wacana ini lebih menekankan pada makna atau maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca (masyarakat).

c. Fungsi Pencitraan Budaya dan Pariwisata

Kabupaten Situbondo juga mempunyai ereneka ragam seni dan budaya kabupaten Situbondo yang mencerminkan banyak corak dan ragam seni dan budaya lokal. Seni dan budaya ini dispesifikasikan menjadi obyek dan daya tarik wisata (ODTW) alam, buatan, dan minat khusus.

Pemerintah kabupaten Situbondo memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Situbondo untuk mengelola aset negara yang berupa obyek dan daya tarik wisata (ODTW) kabupaten Situbondo berupa obyek dan daya tarik wisata alam, buatan, dan minat khusus. Dengan hal itu, Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata kabupaten Situbondo dalam menjalankan fungsinya untuk

memberikan pembinaan, pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja pariwisata, utamanya untuk generasi muda memberikan wadah yang dikenal dengan nama ikatan *Kakang-Embug*. Ikatan *Kakang-Embug* merupakan suatu organisasi atau perkumpulan generasi muda dari pemuda-pemudi berprestasi perwakilan seluruh daerah kabupaten Situbondo yang bertugas untuk menginformasikan dan mempromosikan kebudayaan dan pariwisata kabupaten Situbondo.

Reputasi yang baik sangatlah diperlukan agar suatu organisasi mendapat kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, sangatlah penting pencitraan budaya dan pariwisata demi kelestarian lingkungan melalui budaya dan kekayaan pariwisata yang dimilikinya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis wacana politik berbahasa Indonesia bidang pembangunan daerah era reformasi di kabupaten Situbondo dapat dikelompokkan menjadi (1) bentuk wacana politik yang meliputi sumber informasi berupa teks dan non teks; (2) konteks wacana politik meliputi konteks sosial budaya, konteks sosial politik dan konteks sosial ekonomi; (3) ideologi yang terkandung dalam wacana politik diantaranya ideologi Islam, ideologi demokrasi dan ideologi humanisme; dan (4) fungsi wacana politik secara direktif, informasional dan pencitraan budaya dan pariwisata.

Adapun saran dalam penelitian ini bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk melakukan penelitian yang mengkaji terkait jenis penelitian analisis wacana. Selain itu, Penelitian ini masih terbatas pada bentuk, konteks, ideologi dan fungsi wacana politik, diharapkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dapat dikembangkan fokus penelitian pada ragam bahasa dalam wacana politik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Sukatman, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Rusdhianti Wuryaningrum, S.S., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas bimbingan yang telah diberikan untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini serta almamater Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang selalu dibanggakan.

Daftar Pustaka

Djajasudarma, T Fatimah. 1993. *Metode Linguistik:*

Ancangan Penelitian dan Kajian.
Bandung: ERESKO.

Halim, Amran. 1980. *Politik Bahasa Nasional.* Jakarta: Balai Pustaka.

Halis *et al.*, *Analisis Wacana Politik Berbahasa Indonesia Bidang Pembangunan Era Reformasi di Kabupaten Situbondo*

Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

